
Menggereja Bersama Kaum Miskin: Relevansi Ulangan 15: 1-11

Edward Jakson Turalely¹; Monike Hukubun^{2*}

^{1,2}, *Program Magister Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku*

**Corresponding Author*

Email: monikehukubun2013@gmail.com

Submitted: 12-08-2023

Accepted: 18-12-2023

Published: 28-12-2023

Abstract

Poverty has been at the core of human civilization and a major problem in the nation-building process. Therefore, this article aims to make relevant the theological meaning of Deuteronomy 15:1–11, which has been studied ideologically, to the reality of poverty in Maluku. This effort was carried out using the literature study method by studying and analyzing several references related to the theological meaning of Deuteronomy 15:1–11 and the dialogue with the context of poverty in Maluku. Based on the research process, a theology of the church with the poor in Maluku was produced. All components are called to understand that God is on the side of the poor and then put it into practice in the reality of life, which is increasingly threatened. The theology of churching with the poor as the main thesis of this research is discussed in three analytical frameworks: revealing the reality of poverty in Maluku, interpreting the ideology of Deuteronomy 15:1–11, and finding the perspective of God's partiality towards the poor. , and ending with the praxis of GPM's ecclesiology.

Keywords: Poverty; Deuteronomy 15: 1-11; Preferential option for the poor; Maluku

Abstrak

Kemiskinan telah menjadi persoalan sepanjang peradaban manusia dan masalah serius dalam proses pembangunan bangsa. Karena itu, tujuan dari artikel ini dibuat adalah merelevansikan makna teologis Ulangan 15: 1-11, yang telah dikaji secara ideologi terhadap realitas kemiskinan Maluku. Upaya tersebut dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisa sejumlah referensi terkait makna teologis Ulangan 15: 1-11 secara ideologis dan mendialogkannya dengan konteks kemiskinan di Maluku. Berdasarkan proses penelitian, dihasilkan teologi menggereja bersama kaum miskin di Maluku. Seluruh komponen terpenggil untuk memahami TUHAN yang berpihak terhadap orang miskin dan kemudian mengaktakannya dalam kenyataan kehidupan yang semakin terancam. Teologi menggereja bersama orang miskin sebagai tesis utama penelitian ini dibahas dalam tiga kerangka analisis, yakni menguak realitas kemiskinan di Maluku, tafsir idiologi Ulangan 15:1-11 dan menemukan perspektif keberpihakan Tuhan kepada orang miskin, dan diakhiri dengan praksis eklesiologi GPM.

Kata-kata Kunci: Kemiskinan; Ulangan 15: 1-11; Keberpihakan pada orang miskin: Maluku



PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan telah menjadi realita hidup manusia dan masalah serius dalam proses pembangunan bangsa. Persoalan kemiskinan seolah-olah tidak dapat dituntaskan, padahal pemerintah dan masyarakat telah berupaya memperkenalkan sejumlah program pengentasan kemiskinan.¹ Bahkan pemerintah turut melibatkan sejumlah pakar untuk menganalisa persoalan kemiskinan, menemukan akar masalah dan solusi. Namun di tengah usaha yang dilakukan dengan sejumlah pakar, belum ada keberlanjutan, sehingga persoalan kemiskinan terus menjadi ancaman masyarakat dan pembangunan bangsa.²

Sulitnya mengatasi persoalan kemiskinan dipengaruhi faktor penyebab yang kompleks. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung (kemiskinan natural),³ budaya yang berkembang di masyarakat, seperti sikap fatalis, malas, konsumeris, dan lainnya. Bahkan pendapatan-pendapatan ekonomi yang diperuntukan untuk ritual-ritual adat tertentu (kemiskinan kultural),⁴ dan kemiskinan dapat disebabkan atas kebijakan kelompok penguasa yang tidak berpihak terhadap masyarakat kecil (kemiskinan struktural).⁵ Terhadap kompleksnya penyebab kemiskinan dalam masyarakat, I. W. J. Hendriks berpendapat, bahwa persoalan kemiskinan dalam konteks komunal, cenderung disebabkan oleh struktur yang menindas, seperti praktek-praktek ketidakadilan penguasa terhadap masyarakat kecil melalui kebijakan ekonomi dan politik yang tidak pro hidup.⁶

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (BPS) turut memperlihatkan, bahwa Maluku berada pada posisi “keempat” provinsi termiskin di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 322,4 ribu pada September 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebelumnya (periode Maret 2020), diketahui bahwa jumlah tersebut (September 2022) mengalami peningkatan yang tercatat sebanyak 318,18 ribu jiwa.⁷ Sehubungan dengan realitas kemiskinan tersebut, seyogianya menjadi keperihatinan, sehingga kemiskinan menjadi masalah “di dalam” diri dan komunitas yang memerlukan

¹ Marcus J. Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat”, dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, (2009): 1.

² Ricardo F. Nanuru, “Gereja di Jalan Keadilan: Fungsi Sosial Gereja Menghadapi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Komunikasi di Bibir Pasifik”, dalam *Perdamaian dan Keadilan: Dalam Konteks Indonesia yang Multikultural dan Beragam Tradisi Iman*, ed. Yusak B. Setyawan, Nancy Souisa, Steve Gaspersz, dkk (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 407.

³ J. D. Engel, *Gereja dan Masalah Sosial* (Salatiga: Tisara Grafika, 2007), 45.

⁴ Engel, *Gereja dan Masalah Sosial*, 44-45.

⁵ Engel, *Gereja dan Masalah Sosial*, 42-43.

⁶ I. W. J. Hendriks, “Gereja untuk Orang Miskin: Pergeseran Paradigma Pelayanan dan Kepemimpinan Gereja”, dalam *Jurnal For B-Ta: Forum Biblika Kontekstual*, Vol. No. 3, (2014): 2.

⁷ <https://maluku.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>, diakses pada 1 April 2022.

penanganan komprehensif.⁸ Keberpihakan terhadap kaum miskin kemudian seyogianya menjadi persoalan teologis, karena seluruh bentuk ketidakadilan bertentangan dengan kehendak TUHAN. Dalam realitas ketidakadilan yang tercipta maka kaum beriman sesungguhnya terpanggil mengaktakan imannya. Pertanggungjawaban iman bukan semata-mata untuk memberi pertanggungjawaban secara rasional (*fides quaerens intellectum*), namun dengan berjuang bersama untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan (*fides quaerens iustitiam*).

Sehubungan dengan persoalan yang telah dikemukakan maka artikel ini bertujuan untuk mengeksposisi relevansi Ulangan 15 1-11 yang telah ditafsir secara ideologi⁹ terhadap konteks kemiskinan di Maluku. Penulis menyadari, bahwa penelitian tentang kemiskinan di Maluku pernah dilakukan sebelumnya, seperti dalam berbagai publikasi. I. W. J. Hendriks membahas mengenai Gereja untuk Orang Miskin: Pergeseran Paradigma Pelayanan dan Kepemimpinan Gereja.¹⁰ R. Fridolin. Kwailomine juga meneliti, *Kemiskinan dan Struktur Sosial di Maluku dalam Perspektif Social Kapital*,¹¹ George M Likumahua, Jhon A. Titaley, dan Steve Gasperzs menawarkan suatu gagasan solutif pemberdayaan jemaat, *Keluar dari Kemiskinan: Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Jemaat*,¹² Yohanes Parihala dan Rolland A. Samson mendekati persoalan kemiskinan dari perspektif pendidikan pembebasan,¹³ dan Michelle Sharon Pattiasina yang menganalisis, *Pemberdayaan Kaum Miskin sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan*.¹⁴ Dari semua kajian yang telah dilakukan, kajian ini mempunyai sebuah *research-gap*, yang menekankan dialog kritis

⁸ J. B. Banawiratma, *Petrus dan MEA: Lakon Liberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 78.

⁹ Bnd. Edward J. Turalely, Jafet Damamain, Margaretha M. A. Apituley, "Keberpihakan kepada Kaum Miskin: Tafsir Ideologi Ulangan 15: 1-11", dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, (2023): 35-58. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/1008>, diakses pada 11 Agustus 2023.

¹⁰ Hendriks, *Gereja untuk Orang Miskin*, 1-7.

¹¹ Fridolin R. Kwailomine, "Kemiskinan dan Struktur Sosial di Maluku dalam Perspektif Social Capital, dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 3, No. 1, (2021): 22-28. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/600/471>, diakses pada 17 November 2023.

¹² George M. Likumahua, Jhon A. Titaley, dan Steve Gasperzs, "Keluar dari Kemiskinan: Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Jemaat di Dusun Siahari, Kecamatan Seram Utara Timur", dalam *Jurnal Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 2, No. 1, (2020): 91-109. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae>, diakses pada 2 April 2022.

¹³ Yohanes Parihala dan Rolland A. Samson, "Pendidikan yang Membebaskan Masyarakat Waimite dari Kemiskinan", dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 1, No. 1, (2019): 41-59. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/185>, diakses pada 17 November 2023.

¹⁴ Pattiasina O. Michelle. Sharon. "Pemberdayaan Kaum Miskin sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan", dalam *Jurnal BIA: Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 4, No. 1 (2021): 125-140.

realitas kemiskinan di Maluku dengan tafsiran ideologi terhadap Ulangan 15: 1-11, yang bermuara pada sebuah konstruksi teologi menggereja bersama kaum miskin di Maluku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisa sejumlah referensi (buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dll) yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dikhususkan untuk mempelajari referensi yang berkaitan dengan realitas kemiskinan masyarakat yang terjadi di kepulauan Maluku dan makna teologis dari teks Ulangan 15: 1-11. Terdapat tiga upaya yang hendak dilakukan penulis. Pertama, membangun teologi di tengah kemiskinan masyarakat Maluku. Kedua, mengusulkan eklesiologi gereja (khususnya GPM) di tengah realitas kemiskinan. Ketiga, berusaha untuk mengkonstruksikan misi gereja terhadap masyarakat di tengah realitas kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-aspek Kemiskinan di Maluku

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menegaskan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹⁵ Namun UU tersebut berbeda dengan realitas di kepulauan Maluku. Sebagian kawasan di Seram Utara dan Bebar Timur mengalami keterhambatan pendidikan.¹⁶ Keterhambatan tersebut disebabkan karena (a) Bangunan kelas yang tidak memadai, dan (b) Keterbatasan tenaga pendidik/pengajar. Telah ada upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti perekrutan Pegawai Negeri Sipil dan juga program Indonesia Mengajar. Namun dalam implementasinya, proses tersebut bukanlah program jangka panjang, karena turut dibatasi oleh waktu kerja para tenaga, dan lainnya.¹⁷ Karena itu, permasalahan mendasarnya adalah anak-anak di beberapa kawasan kepulauan Maluku tidak memiliki pengetahuan yang memadai karena seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan tidak didasarkan pada tuntutan kurikulum dan standar pendidikan nasional.

Persoalan kemiskinan di Maluku turut merembes ke aspek transportasi. Dalam beberapa kawasan, masyarakat Maluku merasakan kesulitan dalam transportasi (mobil,

¹⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>, diakses pada 23 April 2023

¹⁶ <https://ambon.tribunnews.com/2021/10/19/gelapnya-pendidikan-di-wilayah-pegunungan-seram-utara-latukarlutu-tawarkan-solusi-sebagai-penerang>, diakses pada 23 April 2023.

¹⁷ Pattiasina, *Pemberdayaan Kaum Miskin*, 129.

motor, dll) sehingga sulit melakukan distribusi sumber daya alam (SDA) kepada kawasan-kawasan perkotaan yang memiliki akses perdagangan. Jarak kampung/desa ke pusat kota mencapai belasan sampai puluhan kilo turut diperparah dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai. Pada akhirnya, masyarakat memutuskan untuk berjalan melintasi Hutan dan Sungai demi mendapat penghasilan untuk keluarga.¹⁸ Namun sejumlah barang justru masak dan membusuk dalam proses perjalanan. Sebagian masyarakat harus kembali pulang dengan tidak mendapat penghasilan apapun. Sebagai contohnya, sebagian kawasan di Maluku Tenggara belum memadai sistem perekonomian umat. Sampai saat ini, masih terdapat lokasi tertentu yang memiliki jalan rusak, bahkan moda transportasi yang terbatas. Pada akhirnya, masyarakat sulit mengembangkan sistem ekonomi keluarga dan pariwisata wilayah.¹⁹ Jika persoalan transportasi semakin dianalisis, turut diperlihatkan sarana transportasi laut yang terbatas. Walaupun diakui, bahwa terdapat alat transportasi lokal di beberapa kawasan tertentu. Namun alat transportasi lokal tersebut turut terbatas dalam jangkauan perjalanan dan banyak beban yang ditanggung. Karena itu, masyarakat yang daerahnya terhubung hanya dengan akses laut harus menyediakan biaya perjalanan yang cukup besar.

Pada sisi lain, BPS provinsi Maluku menunjukkan ketersediaan sarana dan pra sarana kesehatan dalam wilayah-wilayah tertentu.²⁰ Bahkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 15 turut menegaskan, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²¹ Namun dalam kenyataannya, ketersediaan sarana dan pra sarana kesehatan belum seimbang dengan kondisi masyarakat. Sebagian wilayah, belum ditemukan sarana dan pra sarana kesehatan mendasar, seperti poliklinik atau puskesmas dan alat-alat kesehatan lainnya. Kenyataan tersebut tentu mempengaruhi akses pemeriksaan kesehatan masyarakat setempat. Apabila terdapat masyarakat yang jatuh sakit maka pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dapat dilakukan di Puskesmas Bantu (PusTu) yang kisaran jauhnya itu kurang lebih 12 km, atau ke Puskesmas terdekat yang berjarak kurang lebih 17 km. Dampak dari kenyataan tersebut

¹⁸ Aholiab Watloly, *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Intimedia CiptaNusantara, 2013), 183.

¹⁹ https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/03.%20Analisis%20Provinsi%20Maluku%202015_ok.pdf, diakses pada 23 April 2023.

²⁰ <https://maluku.bps.go.id/publication/2022/12/20/8fb114abd743e0d4c0788ba6/statistik-kesehatan-provinsi-maluku-2021.html>, diakses pada 23 April 2023.

²¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>, diakses pada 23 April 2023.

adalah (1) Masyarakat cenderung memiliki menggunakan cara pengobatan tradisional dan digeneralisasikan kepada seluruh jenis penyakit, dan (2) Terdapat masyarakat yang meninggal karena tidak lagi mampu untuk bertahan dengan sejumlah penyakit yang diderita.²²

Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan di Maluku

Perbedaan Orientasi Pembangunan Bangsa dengan Eksistensi Masyarakat

Sejak lama, Maluku dikenal sebagai provinsi kepulauan di Indonesia.²³ Namun dalam kesadaran tersebut, kebijakan pembangunan tidak menjadikan konteks kepulauan sebagai tolok ukur. Orientasi pembangunan bangsa Indonesia masih bersifat kontinental (*continental oriented*). Dalam orientasi pembangunan yang berciri continental maka wilayah-wilayah kepulauan cenderung diabaikan, karena dinilai tidak membawa *income* terhadap negara.²⁴ Menurut Kleden, terdapat kekeliruan negara dalam menentukan orientasi kebijakan pembangunan, karena cenderung mengeneralisasi pembangunan masyarakat Maluku yang secara kultural berbudaya pra kapitalis dengan masyarakat purna kapitalis. Penguasa negara seolah-olah mempresepsikan pembangunan Maluku yang eksistensinya sebagai masyarakat kepulauan (*archiepelago oriented*) dengan problematik pembangunan masyarakat purna kapitalis. Akhirnya, kebijakan pembangunan nasional banyak mengalami bias atau penyimpangan, baik secara sosio kultural maupun ideologis.²⁵

Perbedaan orientasi pembangunan telah mengakibatkan terjadinya: 1) Keterisolasian masyarakat Maluku.²⁶ Dalam artian, terdapat sebagian masyarakat Maluku yang terisolasi, karena masih hidup di balik batu, gunung, dan sungai, sehingga sulit mengembangkan hidup, dan 2) Perbedaan orientasi pembangunan bangsa telah turut mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat karena tersegregasi oleh laut kepulauan yang begitu luas dan terbatasnya infrastruktur.²⁷ Ciri pembangunan kontinental telah melupakan eksistensi masyarakat kepulauan, termasuk di kepulauan Maluku, sehingga kebijakan pembangunan wilayah tidak terjadi secara merata. Kebijakan pembangunan cenderung tertuju ke pusat

²² Pattiasina, *Pemberdayaan Kaum Miskin*, 129-130.

²³ Watloly, *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan*, 12.

²⁴ M. G. Lailossa, "Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam Bentuk Model Pembangunan Provinsi Kepulauan", dalam Abidin Wakano dkk (ed), *Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku* (Ambon: Ralallahu Institut, 2012), 4.

²⁵ I. Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1987), 19.

²⁶ Watloly, *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan*, 185.

²⁷ Watloly, *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan*, 191.

dengan dominan wilayah darat. Secara praktis, dampak tersebut menyebabkan adanya dua lingkaran permasalahan besar yang menindih kehidupan masyarakat, yaitu: munculnya bahaya ekonomi yang tinggi (*high cost economic*), yaitu berupa biaya sosial (*social cost*) dan biaya ekonomi (*financial cost*) yang cukup tinggi di masyarakat. Semua barang (baik kepunyaan pedagang maupun produk lokal hasil produksi masyarakat), ditentukan harganya oleh penguasa ekonomi (pedagang), sementara masyarakat kepulauan sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan harga produk lokal dan harga bahan kebutuhannya di pedagang; dan lemahnya nilai tukar masyarakat.²⁸ Artinya, struktur kewilayahan kepulauan yang segregatif dengan keterbatasan transportasi yang menyulitkan aksesibilitas masyarakat kepulauan, telah mengakibatkan lemahnya nilai tukar masyarakat, di mana harga jasa maupun harga barang produk lokal masyarakat kurang memiliki nilai tukar, sehingga begitu rendah dan kurang dihargai.

Ketidakadilan Sistem Ekonomi di Masyarakat

Persoalan kemiskinan di Maluku turut didasari atas penerapan sistem ekonomi yang menindas masyarakat. Dalam artian, pengembangan sistem ekonomi yang selama ini diterapkan, cenderung mengabaikan dimensi ketaatan kepada TUHAN, Allah, sebagai sang Pencipta dan Pemelihara hidup. Sebaliknya, penerapan sistem ekonomi justru memberi penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batas, dan akumulasi kekayaan, sehingga *mentuhankan* mamon terus terjadi. Pada akhirnya, sistem ekonomi yang diterapkan tidak bermuara pada penilaian dan penentuan sistem ekonomi umat²⁹ Bahkan keadaan tersebut semakin dipersulit, ketika penerapan sistem ekonomi dikolaborasi dengan aspek politik yang bertujuan menguatkan institusi dan kelompok tertentu, sehingga sistem kelembagaan dan penguasa diuntungkan dalam sistem bersama, sedangkan kehidupan kaum miskin cenderung terabaikan.

Ketidakadilan sistem ekonomi semakin terlihat, ketika dimensi eksklusifitas semakin menjadi nampak. Dalam artian, keadilan sistem ekonomi hanya terjadi kepada komunitas keagamaan tertentu, ketika penguasa merupakan bagian integral dari komunitas tersebut. Misalnya, jika seorang penguasa beragama Kristen maka keadilan ekonomi hanya (mungkin) dirasakan oleh komunitas agama Kristen; selain daripada itu, ketidakadilan

²⁸ Watloly, *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan*, 191-192.

²⁹ Eka Darmaputera, *Etika Sederhana untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayanan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 23-24.

ekonomi yang menjadi bagian dari komunitas hidup bersama. Secara sederhana, dalam penerapan sistem ekonomi di masyarakat, para penguasa mengabaikan dimensi kemajemukan di masyarakat (terkhususnya Maluku). Sehingga, tidak seluruh komponen yang merasa keadilan sistem ekonomi tersebut. Oleh karena itu, para penguasa perlu terbuka dengan penerapan sistem ekonomi yang inklusif; kepada seluruh umat beragama.³⁰ Sehingga, anggapan bahwa pengembangan sistem ekonomi dapat diatur oleh agama-agama tertentu secara eksklusif, hanyalah mencerminkan sikap keangkuhan bahkan kenafian yang tidak menolong komunitas kaum miskin. Dengan demikian, pengembangan sistem ekonomi yang lebih inklusif dibutuhkan di tengah persoalan kemiskinan masyarakat kepulauan Maluku.

Keberpihakan TUHAN kepada Kaum Miskin: Kritik Ideologi Ulangan 15: 1-11

TUHAN Berpihak kepada Orang Miskin

Diskursus tentang TUHAN di tengah-tengah realitas kemiskinan dan kaum miskin telah terbangun sejak lama. Diskursus tentang kemiskinan dalam gereja Katolik telah dimulai sejak Paus Leo XIII (1878-1903) hingga Paus Yohanes Paulus II (1978-...).³¹ Sehubungan dengan sensitivitas gereja Katolik, B. F. Drewes dan J. Mojau menyatakan bahwa gereja Kristen Protestan telah memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin, sebagaimana Katolik. Bahkan dalam gerakan kekristenan, muncul sejumlah teologi lokal, seperti teologi Minjung dari Korea Selatan dan teologi Dalit dari India, sebagai respon terhadap kemiskinan.³² Menjadi pertanyaan penting dalam teologi-teologi tersebut adalah, dimanakah TUHAN ketika umatnya menjerit di tengah realitas kemiskinan? Apakah TUHAN tidak berpihak kepada kaum miskin, sehingga Ia semakin membiarkan mereka berada di tengah kemiskinan?

Dalam konsep kekristenan, TUHAN dipahami sebagai sosok yang berpihak terhadap kehidupan. TUHAN yang berpihak kepada hidup menentang tindakan ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan tindakan yang tidak memperjuangkan kesejahteraan. Sebaliknya, TUHAN yang berpihak kepada hidup selalu menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan demi kehidupan yang bermakna.³³ Dalam

³⁰ Darmaputera, *Etika Sederhana untuk Semua*, 25.

³¹ Purnomo, *Preferential Option for the Poor*, 1.

³² B. F. Drewes dan Julianus Mojau, *Apa itu Teologi: Pengantar ke dalam Ilmu Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 67-69.

³³ Singgih, *Dunia yang Bermakna*, 158-159.

pengembangan teologi “Pro hidup”, TUHAN yang diimani dipahami sebagai TUHAN yang peduli terhadap pergumulan kehidupan umat. Bahkan kepedulian TUHAN, digambarkan selayaknya seorang Bapa yang sayang kepada anak-Nya, bahkan seorang Ibu yang mengasihi anak-Nya. Dalam gagasan teologi TUHAN yang berpihak kepada hidup, Ia tidak hanya dipahami secara transenden, namun TUHAN yang berpihak kepada hidup umat telah turut meng-imanensi-kan diri-Nya dalam kehidupan dan karya Yesus Kristus. Dalam iman-Nya TUHAN di dalam Yesus Kristus, Ia berpihak kepada kelompok masyarakat yang tersingkirkan karena berbagai kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan kelompok penguasa.

Gagasan teologi serupa turut ditemukan dalam penafsiran ideologi Ulangan 15: 1-11. Dalam penafsiran, diketahui bahwa TUHAN menentang ideologi pembebanan terhadap orang miskin. Segala bentuk pembebanan di dalam sistem sosial dan ekonomi (stratifikasi, hutang, gadai, bunga, dan perbudakan) seyogianya dihapuskan sebagai bentuk ketaatan iman umat Israel terhadap TUHAN yang memberikan kehidupan. Landasan teologisnya adalah, bangsa Israel pernah menjadi budak dan hidup dalam pembebanan bangsa Mesir, sehingga TUHAN mengambil inisiatif untuk melakukan karya pembebasan. Sumber D menegaskan, bahwa ingatan terhadap peristiwa penindasan di Mesir harus menjadi dasar umat Israel berpihak terhadap orang miskin di Kanaan. Dalam keberpihakan tersebut juga, TUHAN kemudian mengkritisi kehidupan kelompok elit masyarakat yang cenderung melakukan pembebanan, penindasan, dan ketidakadilan terhadap masyarakat kecil Israel. Sumber D menegaskan, bahwa orang kaya harus turut terlibat dalam mengikuti kehendak TUHAN, yaitu melakukan hukum penghapusan hutang untuk kehidupan yang bermartabat.

Sama halnya teologi Kristen, dalam teologi Islam, diketahui bahwa keperihatinan kepada kaum Mustadh'afin (kaum miskin) telah menjadi tema sentral dalam al-Qur'an, sebagaimana orang miskin di Alkitab.³⁴ Dalam beberapa teks al-Qur'an, seperti QS. Al-Hajj/22:73, QS. Al-Rum/30:54, dan QS. Saba/34:44 diperlihatkan bahwa kelompok Mustadh'afin perlu mendapat perhatian khusus, karena kemiskinan yang dihadapi oleh mereka bukan hanya secara alami, namun terdapat tindakan ketidakadilan secara politik dan ekonomi, sehingga menyebabkan mereka berada dalam kondisi miskin. Bahkan Abad Badruzaman menegaskan, bahwa Allah dalam keperkasaan-Nya dapat turut membinasakan

³⁴ Abad Badzuraman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan* (Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Belajar, 2008), 7-8.

kelompok-kelompok yang melakukan penindasan terhadap kaum Mustadh'afin.³⁵ Tindakan tersebut akan terjadi, jika umat tidak mendengarkan dan mengikuti secara taat seruan-seruan nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk membela kaum Mustadh'afin. Kisah nabi Nuh dalam QS. Al-Ankabut/29: 14-15, kisah nabi Hud as dalam QS. Al-A'arad/7:72, kisah nabi Shalih as dalam QS. Al-A'raf/7:78 dan lainnya adalah bukti nyata dari kemurkaan Allah ketika kaum Mustadh'afin tidak dibela dalam seluruh keberadaannya di masyarakat.

Gagasan teologi Kristen (baik Protestan dan Katolik) dan Muslim tentang "TUHAN yang berpihak kepada kaum miskin (Mustadh'afin)" menjadi penyadaran teologi kepada seluruh pembaca, bahwa TUHAN yang diimani dalam agama-agama adalah sosok yang benar-benar memperjuangkan keadilan terhadap kaum miskin. TUHAN yang diimani dalam semua agama adalah sosok yang menentang tindakan ketidakadilan yang berujung kepada kesengsaraan dan penderitaan umat. Hal yang sama turut diperlihatkan dalam Ulangan 15: 1-18, bahwa TUHAN adalah sosok yang menghendaki adanya keadilan dalam setiap kehidupan umat. Bahkan keberpihakan terhadap kaum miskin tidak boleh didasarkan atas nama kelompok tertentu. Namun keberpihakan kepada kaum miskin harus terjadi secara universal. Dalam artian, keberpihakan kaum miskin harus merobohkan batas keagamaan yang secara sadar dijadikan sebagai pemisah antar umat beragama. Upaya tersebut menjadi penting, karena jika keberpihakan tidak dilakukan secara universal maka gerakan-gerakan pembebasan tidak mampu menembusi struktur ketidakadilan yang secara sengaja dibangun oleh kaum elit. Berikut ini, terdapat gagasan tentang peranan TUHAN di tengah-tengah realitas kemiskinan, khususnya yang dapat dikonstruksikan dalam konteks kepulauan Maluku.

TUHAN yang Mengkritisi Ketidakadilan

Sebagaimana telah dikemukakan sejak awal, bahwa kritikan para nabi terhadap realitas ketidakadilan yang memiskinkan umat merupakan keterwakilan suara TUHAN. Misalnya dalam Amos 4: 1-12, nabi Amos menyampaikan pesan, bahwa kerajaan Israel (Utara) akan hancur karena praktek keagamaan yang berbeda dengan perilaku bermasyarakat. Karena, situasi kerajaan sedang mengalami kemakmuran yang luar biasa, sehingga dapat disebut sebagai masa kejayaan. Kemakmuran meliputi hampir di segala

³⁵ Badzuraman, *Teologi Kaum Tertindas*, 41.

sektor kehidupan. Namun, kemakmuran tersebut tidak dirasakan secara menyeluruh oleh umat. Kemakmuran hanya dirasakan oleh orang-orang elit. Amos turut menghadapi masalah sosio dan religius bangsa Israel Utara, yakni ketidakadilan kelompok elit dan praktek ibadah yang tidak berkenan kepada TUHAN. Amos melihat ketidakadilan bangsa Israel, sebagai pertentangan kehendak TUHAN. Bahkan, sekalipun mereka taat dalam tradisi keagamaan, namun selalu memeras orang miskin, sehingga orang-orang yang termarginal itu semakin menderita. Karena itu, Amos berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan.

Solidaritas kepada kaum miskin semakin berkembang dalam proses pelayanan Yesus. Ditegaskan bahwa Yesus menyatakan keberpihakan kepada kaum miskin, dalam tengah imperialisme kekuasaan kerajaan yang sangat membahayakan diri-Nya. Gerakan solidaritas Yesus kepada kaum miskin dipahami sebagai “politik Yesus”. Dalam artian, Yesus berusaha memberikan pembebasan kepada orang miskin dan kelompok masyarakat terpinggirkan lain.³⁶ Salah satu teks PB yang memperlihatkan keberpihakan Yesus, sekaligus mengkritik kekuasaan yang menindas kaum miskin adalah Lukas 4: 18-19. Secara historis, injil Lukas merupakan kitab yang ditulis dan dialamatkan kepada komunitas Kristen berlatar belakang Yunani-Helenistik – yang hidup di luar kota Palestina. Pada masa itu, orang-orang Kristen asal non Yahudi (Yunani-Helenis) yang berasal dari kelas menengah yang kaya dan terkemuka sudah mulai menjadi bagian dari persekutuan jemaat, sedangkan sebagian besar warganya berasal dari kelas sosial dan ekonomi yang rendah. Mereka adalah rakyat jelata yang bekerja sebagai petani di desa, pengrajin, pedagang kecil, dan budak. Mereka adalah orang miskin yang hidupnya termarginalisasi dan menderita.³⁷ Hal ini juga diperlihatkan melalui proklamasi visi dan misi Yesus dalam Lukas 4: 18-19. Proklamasi Yesus hendak mempertegas, bahwa komunitas jemaat Lukas telah dan sementara mengalami kesenjangan sosial-ekonomi yang besar, antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kesenjangan sosial tersebut diperkokoh melalui cara pandang, sikap etis, dan laku sosial “orang-orang kaya” yang egois dan tamak, serta mengabaikan orang miskin, sehingga kehidupan komunitas kaum miskin menjadi semakin menderita.

³⁶ Paulus S. Widjaya, “Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus”, dalam *Jurnal Gema Teologi*, (2014).

³⁷ Samuel Benjamin Hakh, *Perjanjian Baru: Sejarah, Pengantar, dan Pokok-pokok Teologinya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 292.

Teks Lukas 18: 9-14, 18-27 sesungguhnya secara lugas memperlihatkan, sekaligus mempertegas sikap egois dari komunitas orang kaya dalam konteks penulisan injil Lukas.³⁸ Kenyataan tersebut dapat dipertegas melalui tuturan penulis injil Lukas, bahwa seorang kaya yang diperintahkan untuk melakukan keadilan dengan cara membagi kekayaan yang dimiliki terhadap sesamanya, justru merasa sangat sedih. Padahal jika semakin menelisik injil Lukas, ciri hidup persekutuan mula-mula, dengan upaya saling berbagi dengan penuh kasih merupakan aspek penting. Dengan demikian, ungkapan “sedih” yang dimunculkan oleh penulis injil Lukas sesungguhnya memperlihatkan rasa egois orang kaya, karena tidak bersedia membagi kekayaan yang dimiliki terhadap sesamanya yang membutuhkan. Namun menariknya, Lukas 19: 1-10 memperlihatkan narasi yang bertentangan. Karena Zakheus sebagai gambaran dari orang kaya, justru mengalami transformasi hidup ketika berjumpa dengan Yesus. Zakheus yang adalah seorang kaya, justru dengan penuh kerelaan/sukarela membagi kekayaan terhadap sesamanya, terkhususnya sesama Zakheus, yang dulu pernah diperas olehnya.³⁹

Patut juga untuk diketahui, bahwa pada abad pertama Masehi, wilayah Palestina dan wilayah-wilayah luar Palestina berada di bawah kekuasaan imperium Romawi. Sebagai wilayah jajahan Roma, kehidupan masyarakat didominasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kaisar dari para elit imperium Romawi. Sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dipraktikkan cenderung berpihak terhadap kepentingan elit-elit politik dan ekonomi. Mereka terdiri dari Kaisar dan para wakilnya di wilayah-wilayah, pemilik modal, dan para tuan tanah yang menguasai wilayah pertanian di pedesaan. Para bangsawan tinggal di kota-kota Romawi, yang dipahami sebagai pusat kekuatan ekonomi imperium romawi. Dalam kota-kota tersebut, pemerintah Romawi membangun gedung yang mewah, fasilitas publik yang lengkap, serta jaminan keamanan yang tinggi. Dalam kota itu juga, para bangsawan Romawi tinggal dan menikmati kehidupan yang sejahtera. Jumlah kaum elit yang menikmati kesejahteraan atas nama negara (Romawi) hanya berada di kisaran 7% dari jumlah populasi masyarakat.

Kenyataan tersebut kemudian menegaskan, bahwa 93% populasi di imperium Romawi adalah masyarakat yang hidup di pinggiran kota dan di wilayah pedesaan. Mereka terdiri dari petani yang mengerjakan lahan pertanian, para pengrajin, dan para pedagang

³⁸ Hakh, *Perjanjian Baru*, 293.

³⁹ Hakh, *Perjanjian Baru*, 295-296.

kecil, selain para budak yang diperkerjakan oleh para penguasa ekonomi.⁴⁰ Osiek dan Balch menegaskan, bahwa 93% rakyat yang hidupnya menderita pada masa kerajaan Romawi, disebabkan beberapa hal, misalnya: 1) Adanya sistem pajak yang tinggi, sehingga menyebarkan rakyat-rakyat kecil menjadi kesusahan untuk membayarnya. Sekalipun dalam kenyataannya, kelompok penguasa yang menikmati pajak tersebut. 2) Penguasaan lahan pertanian di desa-desa oleh elit ekonomi (seperti pengusaha dan tuan tanah). Sejumlah literatur memperlihatkan, bahwa penguasaan lahan terjadi karena adanya penerapan sistem gadai dan hutang di masyarakat. Sehingga, masyarakat dapatlah menggadaikan tanahnya, bahkan beralih kepemilikan terhadap kelompok penguasa. 3) Adanya sistem perbudakan yang terus terjadi, bahkan berkembang dengan cukup masif terhadap umat yang berada dalam pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti pertanian dan perdagangan. Kenyataan turut membuktikan, bahwa seseorang dapat menjadi budak, jika dirinya lahir dari keluarga budak.

Realitas ketidakadilan yang memperhatikan dialami oleh rakyat di wilayah imperium Romawi kemudian dikritisi melalui gerakan pembebasan dan transformasi Yesus. Visi Yesus yang diproklamasikan dalam Lukas 4: 18-19, yakni “terwujudnya tahun rahmat Tuhan” yang diimplementasikan dalam misi Yesus: “memberitakan kabar baik” dan “membebaskan”. Kata-kata kerja ini menegaskan tentang perjuangan untuk membebaskan, mentransformasi, dan menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kepada “orang-orang miskin” (*ptokhos*), “orang-orang tawanan” (*aikhmalotos*), “orang-orang buta” (*tuflos*), dan “orang-orang yang tertindas” (*tetharausmenos*). Dengan demikian, aksentuasinya sesungguhnya berada pada karya penyelamatan Allah untuk membebaskan ciptaan-Nya yang mengalami penindasan dan penderitaan. Tahun Rahmat TUHAN yang diwujudkan di dalam dan melalui Yesus Kristus adalah era pembebasan dan transformasi dari segala sistem sosial, struktur sosial, dan pola relasi sosial yang diskriminatif, eksploitatif, menindas, dan memiskinkan, serta yang menyengsarakan kehidupan sesama ciptaan.⁴¹

Melalui hukum dan pelaksanaan Tahun Rahmat TUHAN maka TUHAN mengutus Yesus menghidupkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, cinta kasih, persahabatan, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang memungkinkan transformasi sistem sosial, struktur

⁴⁰ Carolyn Osiek dan David L. Balch, *Families in the New Testament, Household and House Church* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press), 37.

⁴¹ Hakh, *Perjanjian Baru*, 296.

sosial, dan pola relasi sosial yang lebih adil, bermartabat, dan lebih menopang kesejahteraan hidup bersama. Karya-karya pembebasan TUHAN melalui Yesus sebagai perwujudan Tahun Rahmat TUHAN menegaskan, bahwa TUHAN menentang ketidakadilan dengan cara apapun, oleh siapapun, dan alasan apapun. Ketidakadilan dalam berbagai wujud (diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penindasan, perbudakan, dll) yang dilakukan oleh siapapun (penguasa sosial, ekonomi, politik, agama) kepada siapapun (orang miskin, kaum terpinggirkan, perempuan dan anak, serta lainnya), atas nama apapun (negara, agama, Tuhan, dll), dan dengan alasan apapun (kepentingan individu, kelompok, dll) ditentang TUHAN. TUHAN adalah sosok yang menderita bersama kaum miskin. Karena itu, TUHAN di dalam Yesus adalah sosok yang berpihak pada keadilan dan berkarya untuk menegakan keadilan.

TUHAN dan Keberpihakan yang Universal

Pembacaan terhadap Ulangan 15: 1-18 menampilkan adanya sikap eksklusif keberpihakan kepada kaum miskin, terkait larangan penerapan terhadap orang asing (*nokhri*). Bahkan pelarangan tersebut semakin menjadi problematik teks, ketika dikaitkan dengan YHWH sebagai pelopor pelarangan. Dalam artian, YHWH yang memerintahkan untuk tidak hukum menerapkan penghapusan hutang terhadap orang asing.

Namun telah diketahui, bahwa pelarangan penghapusan hutang terhadap *nokhri* karena sejatinya, mereka adalah kelompok pedagang yang datang ke Kanaan dengan alasan komersial. Sedangkan terhadap *ger*, yaitu orang asing yang hidup, menetap bersama umat Israel, bahkan memiliki kemampuan ekonomi yang tidak mumpuni, TUHAN menyatakan keberpihakan-Nya. Landasan teologisnya, yaitu bangsa Israel pernah menjadi orang asing dan TUHAN menjadi “Allah *ger*” terhadap mereka. Dalam keterasingan tersebut, TUHAN menyatakan kepedulian untuk menghidupkan. Karena itu, seyogianya umat Israel menerapkannya terhadap *ger* yang berada di sekitar kehidupan mereka.⁴² Kenyataan tersebut kemudian menegaskan, bahwa keberpihakan TUHAN terhadap orang miskin di dalam proses pelayanan-Nya menembusi segala batas-batas penghalang antar umat beragama. Karena itu, keberpihakan TUHAN adalah bentuk kasih yang universal.

Keberpihakan TUHAN yang universal kemudian menjadi dasar teologis sebagai “auto kritik” terhadap konsep “pribumi” dan “pendatang/orang dagang” yang selalu

⁴² Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 43.

dikumandangkan dalam kehidupan bersama. Sebagaimana diketahui, bahwa dengan konsep “pribumi” dan “pendatang” maka terciptanya ruang segregasi yang cukup luas. Bahkan segregasi yang terjadi tersebut memunculkan adanya “ideologi penguasaan”, bahkan “ideologi kebencian” antar kelompok satu dan lainnya. Dampak negatifnya adalah, adanya wacana-wacana penguasaan dan kebencian yang terus dikumandangkan, bahkan dilegitimasi dengan nama TUHAN. Dalam artian, dalam wacana penguasaan dan kebencian tersebut, sebagian kelompok memberi penegasan, bahwa TUHAN berkenan terhadap upaya tersebut. Padahal sejatinya, TUHAN menolak ideologi pembebanan dan kebencian, karena pada dasarnya TUHAN menghendaki agar adanya rasa cinta, kasih, dan pengorbanan antar sesama.

Gerakan keberpihakan universal TUHAN semakin tercermin dalam pelayanan Yesus. Gagasan tersebut didasari pada teks-teks Alkitab PB yang memperlihatkan Yesus melakukan perjumpaan dengan masyarakat non Yahudi, sekalipun Yesus adalah seorang Yahudi. Sangat tercermin dalam kisah pelayanan Yesus, bahwa Ia hadir dan membebaskan umat dari berbagai diskriminasi dan penindasan kelompok elit. Drewes dan Mojau berpendapat bahwa sebagian ahli memahami pelayanan Yesus berciri pluralis, sebagai tandingan terhadap pandangan eksklusif.⁴³ Namun perlu disadari bahwa Yesus sesungguhnya tidak hanya mengembangkan pluralis, melainkan pluralis dialogis. Sehingga perbedaan-perbedaan yang dimiliki dilihat sebagai peluang komunikasi dan didialogkan dalam hidup bersama, terutama sekali dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan.

Menggereja Bersama Kaum Miskin: Pergeseran Eklesiologi GPM

Pokok eklesiologi seyogianya mengandung aspek teologis, dogmatik, sosiologi, dan antropologi.⁴⁴ Karena itu, ketika merumuskan eklesiologi maka diperlukan kajian yang integratif terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat/umat, baik dalam konteks kebudayaannya – yang kadang primordial, sambil melakukan transformasi terhadapnya maupun konteks budaya universal/am. Dengan upaya tersebut, barulah eklesiologi disebut

⁴³ Drewes dan Mojau, *Apa itu Teologi*, 66.

⁴⁴ John Chr. Ruhlessin, “Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan”, dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, Elizabet Marantika, Steve G. Chr. Gaspersz, Markus Takaria, dkk. (ed) (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015), 94.

sebagai “eklesiologi yang hidup”, karena berakar dan bertumbuh dari kehidupan umat tersebut.⁴⁵ Terdapat empat perspektif eklesiologi, yaitu:

1. Eklesiologi haruslah menjadi acuan teologi sosial terhadap jati diri-integritas gereja dan arah operasional kepada gereja dalam mengembangkan berbagai sistem bergereja. Jika ditempatkan sebagai bagian dari kerygma maka eklesiologi seyogianya memberi inspirasi ke dalam rumusan pengakuan iman/ajaran gereja.⁴⁶
2. Pada sisi praksis, eklesiologi menerangkan mengenai cara dan tujuan beradanya gereja di tengah-tengah dunia. Suatu eklesiologi mendeskripsikan hal-hal mendasar tentang untuk apa gereja ada di dalam dunia, mengapa gereja lahir.⁴⁷
3. Eklesiologi adalah tanggapan kritis dan reposisi gereja tentang di dalam konteks gumulnya. Dengan dan bersama eklesiologi, gereja dapat mengembangkan cara pandang dan cara paham tentang dirinya, dan tanggung jawabnya di dunia.⁴⁸
4. Eklesiologi adalah kenyataan bahwa gereja berada di dalam dunia; lahir sebagai hasil proses berbudaya masyarakat di dalam konteksnya masing-masing; mengalami pertemuan yang intens dalam relasi interpersonal dan antar masyarakat, serta mengembangkan berbagai karunia sebagai bagian dari peran Roh Kudus di dalam hidup umat. Dalam artian, eklesiologi menuntun kerja teologi kontekstual yang tiada henti.⁴⁹

Menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan eklesiologi GPM? Pertama, dalam alinea kelima Pembukaan Tata Gereja GPM, disebutkan bahwa: “GPM memahami misinya dalam terang kedatangan Kerajaan Allah yang menghadirkan kasih, pertobatan dan pembaharuan, pembebasan, keadilan, kebenaran, perdamaian, dan damai sejahtera terhadap seluruh ciptaan”. Alinea tersebut kemudian dipertegas di dalam Bab IV pasal 8, tentang amanat pelayanan GPM, bahwa salah satu komitmen GPM bersama pemerintah, semua agama, denominasi gereja, dan unsur lainnya adalah melakukan “pembebasan dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan”. Hal itu dikarenakan, GPM memahami bahwa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah masalah kemanusiaan yang dihadapi secara bersama.

⁴⁵ Ruhullessin, *Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan*, 96.

⁴⁶ Ruhullessin, *Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan*, 89.

⁴⁷ Ruhullessin, *Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan*, 89.

⁴⁸ Ruhullessin, *Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan*, 89.

⁴⁹ Ruhullessin, *Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan*, 89-90.

Kedua, corak bergereja GPM adalah parokhial-teritorial, sehingga negeri-negeri yang telah homogen berkembang menjadi jemaat-jemaat Kristen.⁵⁰ Kenyataan tersebut kemudian diperkuat oleh relasi genealogis. Dampaknya adalah terbuka ruang dikotomi adalah penduduk asli dan pendatang (*orang dagang*).⁵¹ Berdasarkan kenyataan tersebut, gereja sebagai keluarga Allah, sebagaimana yang termuat dalam Tata Gereja Bab I tentang “hakekat, wujud, dan moto GPM” kemudian menjadi wawasan dan cara pandang gereja untuk berjalan dan bertumbuh bersama, sebagai keutuhan dari keluarga Allah (bnd. Kisah Para Rasul 2, 1 Korintus 12: 12-31; 16: 1-4, Galatia 5: 2-3).⁵² Menurut Refialy, gagasan tersebut merujuk pada gereja sebagai institusi dan umat, supaya terbangun keluarga Allah yang fungsional.⁵³ Dalam artian, gereja terpanggil untuk bersekutu dan menopang. Dengan demikian, konsepsi keluarga Allah ditransformasikan dan kemudian dimengerti sebagai bentuk reproduksi kontekstual atas konsep keluarga Allah yang selama ini berkembang dalam proses bergereja.⁵⁴

Refialy menegaskan, bahwa eklesiologi “gereja sebagai keluarga Allah” turut memperlihatkan pentingnya membangun persekutuan yang saling menopang.⁵⁵ Dalam PIP-RIPP GPM dipertegas bahwa wawasan keluarga Allah merupakan cara pandang gereja untuk berjalan dan bertumbuh bersama.⁵⁶ Dengan demikian, konsep keluarga Allah tidaklah menunjuk pada status kewargaan, melainkan fungsi dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Karena itu, dapat dipahami bahwa eklesiologi kerajaan Allah merupakan posisi GPM untuk melayani dalam konteks masyarakat majemuk dan mengembangkan kehidupan bergereja yang setara. Anggota keluarga yang satu, harus turut serta merasakan kesusahan keluarga lainnya, bahkan keluarga yang satu harus peka untuk merasakan kesusahan keluarga lainnya. Secara sederhana, Refialy menegaskan bahwa sehubungan membangun eklesiologi keluarga Allah maka yang paling penting untuk dimiliki adalah aspek solidaritas.

Sehubungan dengan gagasan eklesiologi “gereja sebagai keluarga Allah”, penulis mengakui bahwa upaya membangun rasa kebersamaan dan solidaritas antar sesama

⁵⁰ Paulus Refialy, “Gereja sebagai Keluarga Allah: Eklesiologi Kontekstual”, dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah*, Marantika, Gaspersz, Takaria, dkk. (ed), 123.

⁵¹ Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 124.

⁵² Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 125.

⁵³ Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 125.

⁵⁴ Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 125.

⁵⁵ Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 136.

⁵⁶ Refialy, *Gereja sebagai Keluarga Allah*, 129.

menjadi semakin kuat. Namun perlu diakui, bahwa rasa kebersamaan dan solidaritas tersebut cenderung tertuju untuk membangun kehidupan bersama yang sejatinya, sangat majemuk. Dampaknya adalah, isu-isu kemiskinan belum sepenuhnya menjadi tanggungan hidup sebagai keluarga Allah. Kenyataan yang ditemukan, GPM masih terjerumus dalam upaya-upaya menguatkan persekutuan secara struktural, bukan secara fungsional. Gagasan membangun persekutuan yang fungsional hanya menjadi cita-cita semata, sehingga upaya bersama untuk memerangi isu kemiskinan belum menjadi gerakan bersama seluruh umat. Bahkan realitas tersebut turut diperburuk dengan kenyataan penguatan institusi yang dilakukan oleh gereja. Gereja masih terjerumus dalam upaya untuk mempertahankan *status quo*, sehingga melupakan pengakuan bersama terhadap kehidupan seluruh ciptaan yang menderita. Terhadap kenyataan itulah, gereja perlu melakukan pergeseran atau setidaknya, pengembangan eklesiologi yang dimiliki, supaya tidak hanya bertujuan untuk membangun persekutuan sebagai keluarga Allah dalam konsep hirarkis, namun persekutuan yang bermuara dalam upaya memperjuangkan hidup.

Gereja dalam Gerakan Perubahan Paradigma dan Orientasi: Penguatan Institusi Menjadi Pro Hidup

Sehubungan dengan gagasan “gereja bersama kaum miskin” maka GPM perlu melakukan pergeseran paradigma dari “paradigma penguatan institusi” ke “paradigma pro hidup”. Secara praktis, terdapat dua aspek yang ikut terpengaruh oleh paradigma tersebut, yaitu:

a) Paradigma

Paradigma penguatan institusi akan menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down approach*). Hal ini paling jelas kelihatan, antara lain dalam penetapan program pelayanan. Program pelayanan harus seragam dari Sinode sampai ke Jemaat. Akibatnya, sebagian pelayan dan umat tidak lagi mempertanyakan relevansi program Sinode tersebut di tingkat Jemaat. Menurut Hendriks, tindakan seperti ini salah menginterpretasi konsep sentralisasi visi dan desentralisasi prakarsa.⁵⁷ Sebagai suatu gereja, visi sentral dirumuskan oleh Sinode dan dirumuskan dalam Pola Induk Pelayanan Gereja (PIP) dan Ketetapan/Keputusan di tingkat Sinodal. Tetapi yang menjadi program konkret sebagai penjabaran visi sentral ini harus diputuskan oleh Klasik dan Jemaat masing-masing.⁵⁸

⁵⁷ Hendriks, *Gereja untuk Orang Miskin*, 2-3.

⁵⁸ Hendriks, *Gereja untuk Orang Miskin*, 3.

b) Orientasi

Pergeseran paradigma akan menyebabkan perubahan orientasi. Orientasi penguatan institusi harus dikembangkan menjadi orientasi hidup. Itu berarti, hidup harus menjadi fokus perhatian, sehingga institusi hanya menjadi salah satu aspek dan tidak menjadi tujuan. Institusi adalah alat untuk mengembangkan kualitas hidup itu sendiri. Menempatkan institusi dalam perspektif ini, menyebabkan kepentingan institusi selalu takluk di bawah kepentingan hidup. Menjadi pertanyaannya, apakah institusi kemudian menjadi tidak penting? Secara sederhana, tidaklah demikian. Kepentingan institusi jelas tidak diragukan, karena institusi dibutuhkan untuk menata pelayanan, tetapi tidaklah dapat menjadi yang diutamakan.

Gereja dan Gerakan Solidaritas bersama Kaum Miskin: Sebuah Gerakan Kolaboratif

Sebagaimana dikemukakan, keberpihakan terhadap orang-orang miskin masih perlu dikembangkan dalam ranah afektif dan psikomotorik. Berikut ini, beberapa usulan penulis terhadap GPM terkait upaya gerakan solidaritas bersama orang-orang miskin di Maluku:

Pertama, dalam gerakan solidaritasnya bersama kaum miskin, GPM perlu untuk mengembangkan spiritualitas ugahari (kesederhanaan). Dalam arti, menekankan kualitas hidup orang beriman yang berorientasi kepada kehidupan yang sederhana dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki sebagai anugerah TUHAN. Spiritualitas ugahari merupakan suatu pembaruan terhadap gaya hidup materialistis, konsumeralistis, yang serakah dan tamak. Pengembangan spiritualitas ugahari didasarkan pada pergumulan umat Israel di padang gurun, dimana TUHAN selalu menyediakan mana dan puyu secukupnya untuk keberlangsungan hidup mereka (bnd. Keluaran 16: 16, 18; 2 Korintus 8: 15). Bahkan pengembangan spiritualitas ugahari didasari dalam ajaran “doa bapa kami”, dimana Yesus mengajarkan para murid, termasuk gereja untuk memohon agar TUHAN memberikan makanan yang secukupnya (bnd. Matius 6: 11). Dengan demikian, spiritualitas ugahari perlu dikembangkan untuk membangun kualitas hidup orang percaya di tengah dunia yang makin marak dengan berbagai praktek-praktek kapitalis, korupsi, dan eksploitasi serta perampasan hak-hak hidup ciptaan lainnya.⁵⁹ Terhadap gagasan tersebut, GPM dapat mengupayakannya melalui proses-proses pemberitaan firman dalam ibadah-ibadah.

⁵⁹ Ajaran Gereja (Hasil Keputusan Tahun 2016), 95, no. 415.

Dalam artian, materi-materi Khotbah, Renungan, PA, Diskusi, dan Meditasi, dalam kebaktian setiap jenjang dapat memuat gagasan-gagasan teologi tentang pentingnya menghidupi spiritualitas ugahari dalam setiap proses perjalanan hidup, bersama sesama yang berada dalam kemiskinan.

Kedua, gereja, terkhususnya GPM sebagai wujud pemerintahan TUHAN di dunia harus berada di pihak kaum miskin demi membebaskan orang-orang miskin dari penderitaan mereka.⁶⁰ Terhadap gagasan tersebut maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh GPM, sekaligus turut bekerja sama dengan pemerintah daerah Maluku, yaitu:

- a) GPM perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait orientasi pembangunan bangsa yang berbeda dengan eksistensi masyarakat. Upaya ini menjadi penting, karena turut berkontribusi terhadap proses-proses pembangunan masyarakat. Gagasan awal dari tulisan ini telah memperlihatkan, bahwa orientasi pembangunan yang keliru dari eksistensi masyarakat kepulauan telah mengakibatkan sejumlah masyarakat hidup di berbagai pedalaman, yang jauh dari kata nyaman dan damai.
- b) Sehubungan dengan gagasan pertama, GPM perlu menyuarakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok negeri. Gagasan pemerintah untuk memulai pembangunan dari Timur, perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur masyarakat. Gedung-gedung pendidikan, kesehatan bahkan akses transportasi merupakan kenyataan yang perlu mendapat perhatian serius dalam dana pembangunan daerah.
- c) GPM perlu berkoordinasi dengan pemerintah, terkait dana-dana pemberdayaan kelompok masyarakat. Upaya ini menjadi penting, sehingga masyarakat yang berada dalam taraf hidup pra sejahtera menurut ketentuan pemerintah dapat diberdayakan melalui berbagai kemampuan yang dimiliki. Upaya ini turut menegaskan tentang menjadikan orang miskin sebagai subjek pembebasan dan pemberdayaan, sehingga orang miskin tidak bergantung terhadap pihak manapun.

KESIMPULAN

Persoalan kemiskinan di Maluku semakin hari menjadi semakin kompleks. Karena itu, gereja dalam persoalan kemiskinan tidak boleh menjadi statis, bahkan sebagai penonton. Namun sebaliknya, gereja harus bergerak bersama seluruh umat dalam upaya pengentasan

⁶⁰ Pattiasina, *Pemberdayaan Kaum Miskin*, 135-136.

persoalan kemiskinan. Sejalan dengan itu, gereja perlu untuk melakukan pergeseran paradigma dari “paradigma penguatan institusi” ke “paradigma pro hidup”. Secara praktis, dengan pergeseran paradigma tersebut maka gereja yang cenderung berada dalam pemahaman ketat ritual serta kekuatan sistem kelembagaan, kemudian ditransformasi untuk lebih mendahulukan umat, terkhususnya kelompok umat yang cenderung terpinggirkan. Dalam gerakan solidaritasnya bersama kaum miskin, GPM perlu untuk mengembangkan spiritualitas ugahari (kesederhanaan) dan mengikuti Tuhan (mengambil jalan kemuridan), sehingga berada dalam jalan Yesus untuk bekerja melakukan tugas membantu orang miskin keluar dari kemiskinan yang mereka alami dan derita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajaran Gereja GPM (Hasil Keputusan Tahun 2016).
- Badzuraman, Abad. *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*. Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Belajar, 2008.
- Banawiratma, B. J. *Petrus dan MEA: Lakon Liberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Darmaputera, Eka. *Etika Sederhana untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayanan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Drewes, F. B dan Mojau, Julianus. *Apa itu Teologi: Pengantar ke dalam Ilmu Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Engel, J. D. *Gereja dan Masalah Sosial*. Salatiga: Tisara Grafika, 2007.
- Gaspersz, Steve. “Agama, Kemajemukan, dan Kemiskinan: Suatu Perspektif Teologi”, dalam *Setegar Batu Karang, Selembut Embun Pagi*, A. M. L. Batlajery, G. J. Damamain, Febry Tetelepta, dkk. (ed). Jogjakarta: Grafika Indah, 2010.
- Hakh, Samuel Benjamin. *Perjanjian Baru: Sejarah, Pengantar, dan Pokok-pokok Teologinya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- <https://maluku.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>, diakses pada 1 April 2022.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>, diakses pada 23 April 2023
- <https://ambon.tribunnews.com/2021/10/19/gelapnya-pendidikan-di-wilayah-pegunungan-seram-utara-latukarlutu-tawarkan-solusi-sebagai-penerang>, diakses pada 23 April 2023.
- https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/03.%20Analisis%20Provinsi%20Maluku%202015_ok.pdf, diakses pada 23 April 2023.
- <https://maluku.bps.go.id/publication/2022/12/20/8fb114abd743e0d4c0788ba6/statistik-kesehatan-provinsi-maluku-2021.html>, diakses pada 23 April 2023.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>, diakses pada 23 April 2023.
- Kwailomine, R. Fridolin, “Kemiskinan dan Struktur Sosial di Maluku dalam Perspektif Social Capital, dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 3,

No. 1, (2021): 22-28. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/600/471>, diakses pada 17 November 2023.

Lailossa, M. G. “Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam Bentuk Model Pembangunan Provinsi Kepulauan”, dalam Abidin Wakano dkk (ed). *Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku*. Ambon: Ralahu Institut, 2012.

Likumahua, M. George, Titaley, A. Jhon dan Gasperzs Steve “Keluar dari Kemiskinan: Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Jemaat di Dusun Siahari, Kecamatan Seram Utara Timur”, dalam *Jurnal Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 2, No 1, (2020): 91-109. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae>, diakses pada 2 April 2022.

Nanuru, F. Ricardo. “Gereja di Jalan Keadilan: Fungsi Sosial Gereja Menghadapi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Komunikasi di Bibir Pasifik”, dalam *Perdamaian dan Keadilan: Dalam Konteks Indonesia yang Multikultural dan Beragam Tradisi Iman*, diedit oleh. Yusak B. Setyawan, Nancy Souisa, Steve Gaspersz, dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Osiek, Carolyn dan David L. Balch. *Families in the New Testament, Household and House Church* (Louisville, Kentucky: Wetsminster John Knox Press.

Parihala, Yohanes. *Menggereja yang Pro Hidup*. Papua: Aseni, 2019.

Parihala, Yohanes dan Samson A. Rolland, “Pendidikan yang Membebaskan Masyarakat Waimite dari Kemiskinan”, dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 1, No. 1, (2019): 41-59. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/185>, diakses pada 17 November 2023.

Pattiasina O. Michelle. Sharon. “Pemberdayaan Kaum Miskin sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan”, dalam *Jurnal BIA: Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 4, No. 1 (2021): 125-140.

Paulus Refialy, “Gereja sebagai Keluarga Allah: Eklesiologi Kontekstual”, dalam *Delapan Dekade GPM Menenam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah*, Marantika, Gasperzs, Takaria, dkk. (ed).

Purnomo, B. Aloys. *Preferential Option for the Poor: Memihak Kaum Miskin, Siapa Berani?*. Medan: Bina Media, 2000.

Purwatma, Matheus. “Berteologi bersama Kaum Miskin: Tantangan bagi Teologi Kontekstual Masa Kini”, dalam ed. Wahyu S. Wibowo dan Robert Setio, *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*. Jogjakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2016.

Ruhlessin, John Chr. “Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan”, dalam *Delapan Dekade GPM Menenam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, Elizabet Marantika, Steve G. Chr. Gasperzs, Markus Takaria, dkk. (ed). Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015.

Turalely, J. Edward, Damamain, Jafet, Apituley, M. A. Margaretha, “Keberpihakan kepada Kaum Miskin: Tafsir Ideologi Ulangan 15: 1-11”, dalam *Jurnal Arumbae: Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, (2023): 35-58. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/article/view/1008>, diakses pada 11 Agustus 2023.

Watloly, Aholiab. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Intimedia CiptaNusantara, 2013.

Widiatmadja, Josef P. *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.